

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MENGUNAKAN KONSEP VALUE FOR MONEY**

Neti Oktavianty¹⁾, Gita Desyana²⁾, Rudy Kurniawan³⁾

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura

¹E-mail: b1031211072@student.untan.ac.id

²E-mail: gita.desyana@ekonomi.untan.ac.id

³E-mail: rudy.kurniawan@ekonomi.untan.ac.id

Abstract

The objectives of this study are as follows: (1) To evaluate the performance of the Government of the Provinsi Kalimantan Barat from 2019 to 2022 using the concept of value for money, with a focus on the economic aspect; (2) To assess the government of the Provinsi Kalimantan Barat between 2019 and 2022 with the use of the value for cash concept, with an emphasis on the efficiency aspect; (3) To measure the performance by the Government in the West kalimantine province from 2019 until 2022 using a concept of valor for money and focusing on the effectiveness aspect. This study is a case study using a qualitative method, with data from the Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja of the Provinsi Kalimantan Barat during the period. The method of analysis used is descriptive analysis. The results of the research show that the kinerja Keuangan of the Provinsi kaliamntan Barat from 2019 to 2022, evaluated with the concept of value for money from the economic, efficiency, and efficiency aspects, is in the category of economic criteria, quite efficient, and highly effective.,

Keywords : Kinerja Keuangan, Realisasi Anggaran, Value For Money

1. PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai sektor publik di Indonesia tidak dapat lepas dari keuangan negara. Dalam beberapa waktu, akuntansi sektor publik di Indonesia berkembang sangat pesat bersamaan pelaksanaan otonomi daerah. Istilah otonomi daerah telah disebutkan dalam Undang-Undang Konstitusi 1945. Penyerah akan hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Hak otonomi pada tiap masing masing daerah diberi kebebasan dalam mengelola dan menambah sumber pendapatan daerah guna mrndorong pembangunan daerah dan juga kesejahteraan masyarakat tersebut. Pemerintah daerah wajib untuk melaporkan pertanggungjawaban kepada masyarakat, masyarakat akan menilai apakah manajemen keuangan pemerintah daerah bisa dikatakan sesuai atau tidak.

Pengukuran kinerja merupakan faktor penting bagi organisasi sektor publik. Pegukuran kinerja

keuangan pada pemerintah daerah perlu dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah serta menilai akuntabilitas organisasi sektor publik dalam usaha mewujudkan pelayanan yang baik dan tepat sasaran. Kinerja pemerintah tidak bisa hanya diukur keberhasilannya dari segi *output* yang diperoleh saja, namun harus memperhitungkan *input*, *output* dan *outcome*. Pengukuran kinerja pemerintah daerah berdasarkan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa diukur dengan penggunaan konsep *value for money*.

Value for money ialah konsep penyelenggaraan organisasi sektor publik yang melandasi pada tiga elemen utama, yaitu; ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2002). *Value for money* merupakan salah satu konsep pengukuran kinerja yang digunakan pada organisasi sektor publik yang harus untuk dioperasionalkan pada pengelolaan keuangan dan anggaran daerah dengan mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio

efektivitas (Dinanty, *et all.*, 2023). Pentingnya konsep *value for money* dalam pengelolaan keuangan sektor publik sering terkendala keterbatasan anggaran dan dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Barat memiliki peran penting yaitu membantu gubernur dalam pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan pada bidang keuangan. Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat bisa dilihat dari tabel dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Laporan Anggaran dan Realisasi
Pendapatan Daerah Tahun 2019-2022

Tahun	Pendapatan		%
	Anggaran	Realisasi	
2019	5.899.219.616.674,00	5.939.753.156.803,85	100,69
2020	5.799.686.674.152,69	5.665.113.367.860,80	97,68
2021	6.435.002.621.090,00	6.431.288.413.189,13	99,94
2022	5.658.492.045.088,00	6.103.471.493.098,21	107,86

Sumber: Data Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi yaitu dimana pendapatan pada tahun 2019 teralisasi sebesar 100,69% dari target yang telah dianggarkan, dan belanja terealisasi sebesar 91,36%. Realisasi pendapatan tahun 2020 terjadi penurunan dari dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 97,68%, sedangkan realisasi belanja mengalami peningkatan yaitu 91,68%. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2021 dan 2022 terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pendapatan tahun 2021 teralisasi sebesar 99,94 dan belanja terealisasi besar 94,17%. Pendapatan tahun 2022 terealisasi sebesar 107,86% dan belanja teralisasi sebesar 94,76%.

Bedasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, rumusan masalah penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun

2019-2022 menggunakan konsep *value for money* ditinjau dari aspek ekonomi; (2) Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2022 menggunakan konsep *value for money* ditinjau dari aspek efisiensi; (3) Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2022 konsep *value for money* ditinjau dari efektifitas. Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka di dapat tujuan penelitian ini sebagai berikut: (1) Untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019-2022 menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari aspek ekonomi; (2) Untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019-2022 menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari aspek efisiensi; (3) Untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019-2022 menggunakan konsep *value for money* yang di tinjau dari aspek efektivitas. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan dan inspirasi kepada penelitian dengan subjek yang sama dan digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pengambilan keputusan.

Landasan Teori

Oraganisasi Sektor Publik

Menurut Mahsun, (2015) organisasi sektor publik ialah organisasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan pegadaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang telah diatur dalam hukum. organisasi sektor publik terdapat dua tipe yang ditinjau berdasakan tujuan dan sumber pendanaannya, yaitu 1) *Pure Non Profit Organization*, yaitu oraganisasi sektor publik yang bertujuan untuk menyediakan atau menjual barang atau jasa dalam pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendanaannya bersumber dari pajak, retribusi, dan penerimaan pemerintah yang lainnya. 2) *Quasi Non Profit Organization*, yaitu organisasi sektor publik yang bertujuan untuk menyediakan atau menjual barang atau jasa dalam pelayanan dan pemerolehan keuntungan (*surplus*). Pendanaannya bersumber dari investor pemerintah atau swasta dan kreditor (Mahsun, 2009 dalam Novitasari & Ardini, 2021).

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran yaitu laporan yang berisikan ikhtisar sumber, alokasi, dan

pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam satu periode pelaporan. (Dodi Nordiawan, 2022). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebut bahwasanya Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu bagian penting laporan keuangan pemerintah dalam menyajikan informasi yang berisikan realisasi anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk satu periode tertentu.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sektor publik bisa dilaksanakan dengan penggunaan indikator kinerja. Tahap awal konsep pengukuran kinerja pemerintah yaitu dengan pengukuran tingkat kehematan (ekonomi) dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam kegiatan pemerolehan (*procurement*) input, diteruskan pengukuran tingkat efisiensi dalam proses pengelolaan *input* menjadi *output* dan diakhiri dengan tingkat pengukuran tingkat efektivitas output terhadap program/ kegiatan yang sudah jelas ditetapkan (*outcome*) (Rai, 2011).

Menurut Rai (2011), Aspek pengukuran kinerja organisasi sektor publik mencakup poin-poin sebagai berikut : (1) *Input* (masukkan) yaitu sumber daya yang diperlukan dalam perwujudan kegiatan dalam rangka mendapatkan *output*, seperti sumber daya manusia (SDM), dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya; (2) *Process* (proses) yaitu kegiatan yang dikerjakan untuk mengolah *input* menjadi *output*; (3) *Output* (keluaran) adalah barang atau jasa yang didapatkan secara konstan dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan *input* yang dipakai; (4) *Outcome* (hasil) yaitu segala sesuatu yang menggambarkan berfungsinya *output* atau efek langsung dari *output* pada jangka waktu pendek.

Value For Money

Menurut Mardiasmo (2009), *Value for money* merupakan dasar dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah yang berlandaskan tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pengimplementasian konsep *value for money* pada organisasi sektor publik memberikan hasil berupa; 1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik, 3) Menurunkan biaya pelayanan publik disebabkan hilangnya efisiensi dan terlaksananya penghematan dalam pemakaian *input*, 4) Alokasi belanja yang akan lebih berorientasi pada kepentingan publik, 5)

Meningkatkan kesadaran terhadap uang publik yang merupakan dasar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Berikut pengertian dari masing-masing elemen *value for money*:

1. Ekonomi

Menurut Mahmudi (2010) dalam Novitasari & Ardini (2021) ekonomi memiliki kaitan dengan penggunaan *input* primer berupa anggaran atau kas yang menjadi *input* regular berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional organisasi. Teknik pengukuran tingkat ekonomi sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria presentase Ekonomis Kinerja Keuangan (Kepmendagri dalam Indrayani, & Khairunnisa, 2018) :

<90	= Sangat Ekonomis
90 - 94,44	= Ekonomis
95 - 100	= Cukup Ekonomis
100,01- 105	= Kurang Ekonomis
>105	= Tidak Ekonomis

2. Efisiensi

Menurut Mahmudi (2010) dalam Novitasari & Ardini (2021) efisiensi adalah keterkaitan antara *output* yang berupa barang atau jasa yang didapatkan dari sumber daya yang dikonsumsi guna menghasilkan *output* tersebut. Proses kegiatan dapat dikatakan efisiensi jika suatu hasil kinerja atau produk yang dihasilkan bisa tercapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Teknik pengukuran tingkat efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria presentase Efisiensi Kinerja Keuangan (Kepmendagri dalam Indrayani, & Khairunnisa, 2018) :

>100	= Tidak Efisien
90 - 100	= Kurang Efisien
80 - 90	= Cukup Efisien
60 - 80	= Efisien
<60	= Sangat Efisien

3. Efektivitas

Menurut Novitasari & Ardini (2021) efektivitas adalah ukuran keberhasilan atau tidak nya suatu organisasi sektor publik dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas

ialah pengukuran dengan membandingkan antara hasil yang diinginkan (target) dengan hasil yang sebenarnya dicapai (realisasi). Hasil yang diinginkan yaitu *outcome* dan hasil yang sebenarnya dicapai merupakan *output*. Teknik pengukuran tingkat efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria presentase Efisiensi Kinerja Keuangan (Kepmendagri dalam Indrayani, & Khairunnisa, 2018) :

- >100 = Sangat Efisien
- 90 – 100 = Efisien
- 80 – 90 = Cukup Efisien
- 60 – 80 = Kurang Efisien
- <60 = Tidak Efisien

2. METODE

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yang berupa studi kasus dengan penggunaan metode penelitian kualitatif. Studi kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kalimantan Barat. Penelitian ini memakai sumber data berupa data sekunder yang tahapan pengumpulannya dengan membaca dan menganalisis data berupa dokumen. Data yang dipakai dalam penelitian ini ialah berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat periode 2019-2022 yang diperoleh dari web resmi Provinsi Kalimantan Barat. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan tujuan untuk menganalisis organisasi sektor publik dengan penggunaan teknik membandingkan elemen yang persis selama beberapa tahun berturut-turut. Penelitian ini mengukur kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan Konsep *value for money* ditinjau dari aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Pengukuran tingkat ekonomi dilakukan dengan membandingkan anggaran belanja dengan realisasi belanja. Kinerja pemerintah daerah dinyatakan ekonomis jika rasio yang dihasilkan

kurang dari 100%. Semakin kecil rasio ekonomi artinya kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Tingkat Ekonomi
Provinsi Kalimantan Barat

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Tingkat ekonomis	Kriteria
2019	6.214.125.824.705,77	5.677.397.310.139,45	91,36%	Ekonomis
2020	5.382.007.853.000,00	4.934.552.187.643,35	91,68%	Ekonomis
2021	6.693.021.789.008,00	6.303.146.996.599,88	94,17%	Ekonomis
2022	4.799.011.537.385,00	4.547.369.876.130,16	94,76%	Ekonomis

Sumber: Data olah

Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja dengan realisasi anggaran. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien jika rasio yang dicapai kurang dari 100%. Semakin rendah rasio efisiensi yang didapat yang artinya semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Tingkat Efisiensi
Provinsi Kalimantan barat

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi	Kriteria
2019	5.899.219.616.674,00	5.677.397.310.139,45	96,24%	Kurang Efisien
2020	5.799.686.674.152,69	4.934.552.187.643,35	85,08%	Cukup Efisien
2021	6.435.002.621.090,00	6.303.146.996.599,88	97,80%	Kurang Efisien
2022	5.658.492.045.088,00	4.547.369.876.130,16	80,36%	Cukup Efisien

Sumber: Data Olah

Pengukuran tingkat efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan kinerja daerah. Kemampuan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikategorikan efektif jika rasio yang dicapai 100%.

Tabel 3.3
Hasil Pengukuran Tingkat Efektivitas Provinsi Kalimantan barat

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2019	5.899.219.616.674,00	5.939.753.156.803,85	100,69%	Sangat Efektif
2020	5.799.686.674.152,69	5.665.113.367.860,80	97,68%	Efektif
2021	6.435.002.621.090,00	6.431.288.413.189,13	99,94%	Efektif
2022	5.658.492.045.088,00	6.103.471.493.098,21	107,86%	Sangat Efektif

Sumber: Data Olah

3.2. Pembahasan

Berdasarkan tabel 3.1 Perkembangan rasio ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2019-2022 konsisten berada dalam kategori ekonomis, meskipun mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2019 ke tahun anggaran 2 terjadi peningkatan sebanyak 0,32%, yaitu dari 91,36% menjadi 91,68%. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 2,49%, yaitu dari 91,68% menjadi 94,17%. Pada tahun 2021 ke 2022 juga terjadi peningkatan yaitu sebanyak 0,59, yaitu dari 94,17% menjadi 94,76%. Hasil pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dengan penggunaan konsep *value for money* dengan fokus tingkat ekonomi belanja Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2022 rata-rata 92,99% yang artinya Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dikatakan ekonomis. Hal ini dikarenakan realisasi belanja lebih sedikit dibandingkan anggaran belanja. Ini juga membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mampu mengecilkkan pemakaian sumber daya dengan menghindari pengeluaran yang boros.

Berdasarkan tabel 3.2 perkembangan rasio efisiensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun anggaran 2019 ke tahun anggaran 2020 terjadi penurunan sebanyak 11,16%, yaitu dari 96,24% menjadi 85,08%. Pada tahun anggaran 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 12,72% yaitu dari 85,08% menjadi 97,80%, dan pada tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi penurunan sebanyak 17,44% yaitu dari 97,80% menjadi 80,36%. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2022 menggunakan konsep *value for money* dengan fokus pada tingkat efisiensi yaitu 89,87% yang berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dikatakan cukup efisien. dikarenakan realisasi belanja lebih sedikit dibandingkan anggaran Pendapatan. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat cukup mampu dalam penggunaan sumber daya yang diperlukan secara minimum dalam mencapai target yang maksimal.

Berdasarkan tabel 3.3 Perkembangan rasio efektivitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 ke tahun anggaran 2020 terjadi penurunan sebanyak 3,01%, yaitu dari 100,69% menjadi 97,68%. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 2,26%, yaitu dari 97,68% menjadi 99,94%, serta tahun 2022 juga terjadi peningkatan yaitu sebanyak 7,92%, yaitu dari 99,94% menjadi 107,86%. Hasil pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan konsep *value for money* dengan fokus tingkat efektivitas pendapatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2022 rata-rata 101,54% yang artinya Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dikatakan sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan target. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil meningkatkan perolehan realisasi pendapatan lebih besar dibandingkan dengan target pendaptannya. Ini juga mengartikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah sesuai dalam menentukan target anggaran, serta mampu terealisasinya pendapatan yang sudah direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi daerah.

4. KESIMPULAN

Kinerja keuangan Pemerintah Kalimantan Barat pada tahun 2019 berada pada kategori kriteria ekonomis dan sangat efektif, tetapi kurang efisien. Pada tahun 2020 tingkat efisiensi mengalami perbaikan menjadi cukup efisien, namun tingkat efektivitas mengalami penurunan menjadi efektif. Pada tahun 2021 masih konsisten dalam kategori ekonomis dan efektif, namun tingkat efisiensi mengalami penurunan menjadi kurang efisien. Serta pada tahun 2021 tingkat efisiensi dan efektivitas mengalami peningkatan menjadi berada pada kategori kriteria ekonomis, cukup efisien, dan sangat efisien.

Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan rasio ekonomi pada tahun 2019 sampai tahun 2022 konsisten berada pada kategori kriteria ekonomis. Hal ini disebabkan oleh realisasi belanja yang lebih sedikit dibandingkan anggaran belanja. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membuktikan kemampuan dalam meminimalisir pemakaian sumber daya dengan menghindari pengeluaran yang boros.

Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan rasio efisiensi selalu mengalami perubahan dari tahun 2019 sampai 2022 masuk dalam kategori kriteria cukup efisien. Hal ini disebabkan oleh realisasi belanja lebih sedikit jika dibandingkan anggaran Pendapatan. Ini juga membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat cukup mampu dalam mengomsumsi sumber daya yang dibutuhkan dengan minimum untuk mencapai target yang maksimal.

Kinerja Keuangan Pemerintah Kalimantan Barat berdasarkan rasio efektivitas selalu mengalami perubahan dari tahun 2019 sampai 2022 masuk dalam kategori kriteria sangat efektif. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil meningkatkan perolehan realisasi pendapatan lebih besar dibandingkan dengan target pendaptannya. Ini juga mengartikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah sesuai dalam menentukan target anggaran, serta dapat merealisasikan pendapatan yang sudah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan untuk lebih bisa mempertahankan kinerjanya dalam merealisasikan anggaran dan harus menggunakan anggaran seefisien mungkin.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis pertama mengucapkan Terima kasih kepada penulis kedua dan ketiga yang telah membantu dalam penelitian yang berjudul Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Provinsi Kalimantan Barat Menggunakan Konsep *Value For Money*.

6. REFERENSI

- Dinanty, D. N., Ainiyah, N., Hartono, H., & Isnaini, N. F. (2023). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Dan Rasio Keuangan Di Kantor Kecamatan Gedeg Periode 2017-2021. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 3(4), 173-183.
- Indrayani, I., & Khairunnisa, K. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe:(Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi dan keuangan*, 6(1), 1-10.
- Larasati, R. S. S. (2022, January). Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan Pendekatan Value For Money. In *Bandung Conference Series: Accountancy* (Vol. 2, No. 1, pp. 78-85).
- Makmur, A. A. R. (2022). Analysis of Value for Money and Accountability in Improving Public Services At The Makassar City Water Corporation. *JEKAMI Journal of Accounting*, 2(2), 87-103.
- Rai, I.G.A. (2011). *Audit kinerja pada sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mariasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mariasmo. (2004). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Novitasari, M. E. I., & Ardini, L. (2021). *Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan*

- Value For Money Sebagai Perwujudan Good Governance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(9).
- Poli, I. R., Saerang, D. P., & Tangkuman, S. J. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4).
- Rahmadhannisa, I (2023). Analisis value for money pada kinerja keuangan pemerintah kota Pontianak tahun 2017-2022. *Skripsi*, tidak publikasi. Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Rumagit, I. B., Karamoy, H., & Afandi, D. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Dinas Pariwisata Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 17(1), 13-22.
- Sasmita, D. (2021). Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kab. Oki Sumatera Selatan Periode 2017-2019. *Journal of Accounting Science and Technology*, 1(2).
- Wuwungan, G. T., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2019). Penerapan Metode Value For Money Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik Di Dinas Kesehatan Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4).
- Yulitiawati, Y., & Rusmidarti, R. (2021). Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Di Kabupaten OKU. *JETAP*, 1(2), 91-109.